



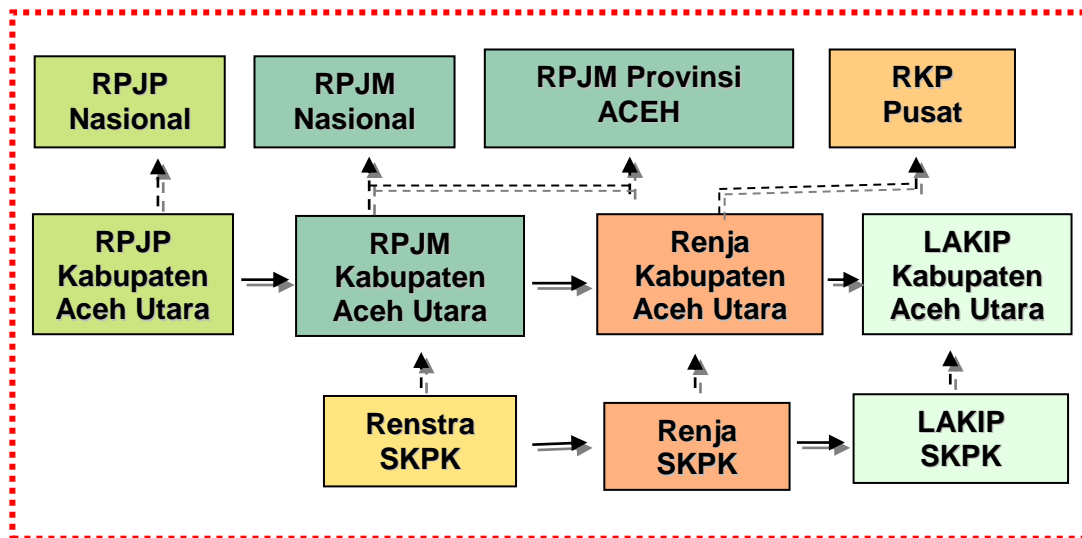
Bab II *Perencanaan Kinerja*

I. RENCANA STRATEGIS

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mempunyai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2012-2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk memetakan posisi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. RPJMD yang disusun merupakan rencana strategis yang diharapkan mampu menjawab posisi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sekarang, tujuan yang ingin dicapai termasuk visi misi daerah. RPJMD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mencakup **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan** serta cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam Program dan Kegiatan.

RPJMD disusun dengan memperhitungkan analisis lingkungan baik kekuatan daerah, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada maupun yang diprediksikan akan muncul. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2016 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016.

Hubungan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya dengan LAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh adalah sebagai berikut:



Pada Tahun 2016 , Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah memiliki RPJP sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017 sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara 2012-2017 yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2013 tentang RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang seharusnya tertuang dalam RPJP Daerah Kabupaten Aceh Utara maupun RT/RW Kabupaten Aceh Utara. Dari keberadaannya akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD. Setiap tahun selama periode perencanaan, akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Perjanjian Kinerja (PK) untuk SKPK.



RPJMD Kabupaten Aceh Tahun 2012-2017 disusun dengan mengakomodir berbagai tuntutan *stakeholders* antara lain pengawasan yang profesional, pelayanan prima, perwujudan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN, serta penerapan *good governance* dalam seluruh aspek asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.

Perencanaan Stratejik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

A. Visi

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”.

Visi pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara, dan selaras dengan RPJM Nasional 2009-2014.

Adapun maksud yang terkandung dalam visi pembangunan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) **Berbudaya** artinya mengamalkan falsafah Aceh yang Islami yakni: *Adat bak Pôteumeurehôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Bentara.*
- 2) **Sejahtera** artinya masyarakat Aceh Utara memperoleh kemakmuran dalam keadilan, kesenangan hidup dalam keadaan aman dan tenteram lahir bathin.
- 3) **Mandiri** artinya masyarakat yang mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan kepada pihak lain.
- 4) **Islami** artinya masyarakat yang berakhlak mulia, berperilaku, berbicara, berbuat, dan bertindak sesuai dengan Syari’at Islam.



B. Misi

Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi/pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 8 (delapan) misi yang telah ditetapkan pada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017, yaitu :

1. Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Mengupayakan stabilitas kehidupan sosial politik dan sosial budaya yang aman dan damai sesuai dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam.
4. Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat.
5. Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.
6. Mengupayakan secepatnya pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintah Aceh Utara satu atap yang menjadi marwah masyarakat Aceh Utara.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang.



8. Mengupayakan penegakan hukum positif dan hukum Islam secara komprehensif dalam segala bidang kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

C. Sasaran Strategis

Penetapan saran strategis dilakukan dengan mempertimbangkan misi Pemerintah daerah sehingga dari setiap misi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terdapat beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2012-2017. Capaian sasaran strategis tersebut dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja yang realistis yang diharapkan dapat dicapai pada akhir masa RPJMD.

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”.

No	Misi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	1.	Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas	B
				Opini pemeriksaan	WTP
				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi
		2.	Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75
II	Mengupayakan stabilitas kehidupan sosial politik dan social budaya yang aman dan damai sesuai dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA	1.	Terciptanya stabilitas sosial dan politik	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	3.86
		2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase jumlah penduduk miskin	19.50



		3.	Menurunnya tingkat angka pengangguran	Angka pengangguran	10.10
III	Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam	1.	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing	Angka melek huruf	97.3
				Rata-rata lama Sekolah	9.3
IV	Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat	1	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu	102
				Angka Kematian Bayi	7
				Persentase Gizi Buruk	0.096
				Umur Harapan Hidup	70
VII	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang	1	Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	56.15
		2	Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata	Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik	63.58
		3	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi	Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)	40.56



		4	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1,367,817
		5	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	4.83
		6	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	37,500
		7	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman	Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)	6.3
		8	Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan	Persentase Produksi perikanan	100
VIII	Mengupayakan penegakan hukum positif dan hukum islam secara komprehensif dalam segala bidang kehidupan masyarakat yang berkeadilan	1	Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla	Jumlah Masjid dan Mushalla	330 dan 852



II. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ada pada RPJMD, maka setiap tahunnya dilakukan pengukuran indikator kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang dianggap penting pada tahun berjalan. Pada tahun 2016 ini, 8 (delapan) misi Kabupaten Aceh Utara dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai. Ukuran pencapaiannya dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Rasional dan Rangible).

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Keputusan Bupati No 061/717/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten 2012-2017. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017 yang memiliki fokus pada prespektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2012-2017 sesuai periode RPJMD telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Utara nomor 061/717/2015 Tahun 2015.



Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2012-2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran dan sumber data)
1.	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing	Angka melek huruf	Formulasi pengukuran: Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya Sumber data: - BPS - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Rata-rata lama Sekolah	Formulasi pengukuran: Kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah diduduki Sumber data: - BPS - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu	Formulasi pengukuran: Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas selama satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seratus ribu Sumber data: Dinas Kesehatan



	Angka Kematian Bayi	Formulasi pengukuran: Jumlah bayi (< 1 tahun) yang meninggal di Kabupaten Aceh Utara selama satu tahun dibagi jumlah dengan kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seribu Sumber data: Dinas Kesehatan
	Persentase Gizi Buruk	Formulasi pengukuran: Jumlah balita yang berstatus gizi buruk di Kabupaten Kabupaten Aceh Utara selama satu tahun dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang pada tahun yang sama kali seratus persen Sumber data: Dinas Kesehatan
	Umur Harapan Hidup	Formulasi pengukuran: Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang Sumber data: - BPS - Dinas Kesehatan



3.	Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Formulasi pengukuran: Panjang jalan yang mantap dibagi dengan Panjang jalan dikalikan seratus persen Sumber data: - Dinas Cipta Karya - Dinas Bina Marga
4.	Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata	Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik	Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi dengan Panjang jembatan dikalikan seratus persen Sumber data: - Dinas Cipta Karya - Dinas Bina Marga
5.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi	Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)	Formulasi pengukuran: Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan luas jaringan irigasi dikalikan seratus persen Sumber data: Dinas Pengairan, Energi Sumber Daya Mineral
6.	Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla	Jumlah Mesjid dan Mushalla	Formulasi pengukuran: Jumlah Mesjid dan Mushalla Sumber data: Dinas Syariat Islam Dinas Cipta Karya



7.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin)	Persentase jumlah penduduk miskin	Formulasi pengukuran: Jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen Sumber data: BPS
8.	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Formulasi pengukuran: Jumlah arus penumpang angkutan umum Sumber data: Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan
9.	Menurunnya tingkat angka pengangguran	Angka pengangguran	Formulasi pengukuran: Jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan seratus persen Sumber data: Dinas Sosia, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
10.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Formulasi pengukuran: PDRB harga konstan tahun n dikurangi dengan PDRB tahun n-1, dibagi dengan PDRB tahun n-1 dikalikan seratus persen Sumber data: BPS



		Indeks Gini	Formulasi pengukuran: $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ Sumber data: BPS
11.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Formulasi pengukuran: Jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi dengan jumlah wisatawan n-1 kalikan seratus persen Sumber data: Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan
12.	Terciptanya stabilitas sosial dan politik	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	Formulasi pengukuran: Jumlah Satpol PP dibagi Jumlah Penduduk dikalikan seratus persen Sumber data: Satpol PP dan WH
13.	Meningkatnya ketersediaan pangan, pola konsumsi serta distribusi pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	Formulasi pengukuran: $100 + \left(\frac{\text{Angka ketersediaan energi-2200}}{2200} \right) \times 100$ Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan



		Tingkat ketersediaan Protein	Formulasi pengukuran: $100 + \left(\frac{\text{Angka ketersediaan protein} - 57}{57} \right) \times 100$ Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
14.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)	Formulasi pengukuran: Sumber data: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
15.	Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan	Persentase Produksi perikanan	Formulasi pengukuran: Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan
16.	Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Formulasi pengukuran: Nilai IKM Sumber data: Bagian Organisasi



17.	Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Formulasi pengukuran: Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Sumber data: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
		Opini pemeriksaan BPK	Formulasi pengukuran: Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Sumber data: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Formulasi pengukuran: Hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri Sumber data: Kementerian Dalam Negeri



Perjanjian Kinerja Kabupten Aceh Utara Tahun 2016 merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 yang berjangka waktu 5 tahunan.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B
		Opini pemeriksaan BPK	WTP
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75
3	Terciptanya stabilitas sosial dan politik	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	3.86
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase jumlah penduduk miskin	19.50
5	Menurunnya tingkat angka pengangguran	Angka pengangguran	10.10
6	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing	Angka melek huruf	97.3
		Rata-rata lama Sekolah	9.3



7	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu	102
		Angka Kematian Bayi	7
		Persentase Gizi Buruk	0.096
		Umur Harapan Hidup	70
8	Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	56.15
9	Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata	Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik	63.58
10	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi	Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)	40.56
11	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1,367,817
12	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	4.83
13	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	37,500
14	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman	Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)	6.3
15	Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan	Persentase Produksi perikanan	100
16	Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla	Jumlah Masjid dan Mushalla	330 dan 852